



SIARAN PERS

PBB akan mengalokasikan paket pendanaan USD 1,7 juta dalam pemberdayaan ekonomi lokal dan kelompok rentan

Jakarta, 8 Maret 2021 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam mendukung semua negara agar dapat pulih dari pandemi - tanpa ada yang tertinggal. Saat ini, PBB telah mengalokasikan paket pendanaan sebesar USD 1,7 juta untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi lokal untuk perempuan dan populasi rentan di Indonesia dan terutama untuk melindungi mata pencaharian mereka dari dampak kehancuran sosial ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Paket pendanaan (sebagai bagian dari United Nations COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund/COVID-19 MPTF) ditujukan untuk menyiapkan sebuah proyek baru yang bertujuan untuk mendukung kelompok yang rentan terkena dampak pandemi, meliputi perempuan, pemuda, pengungsi, pekerja migran, orang dengan HIV, populasi kunci yang paling rentan terhadap HIV dan orang-orang yang tinggal di daerah tertinggal. Proyek ini menawarkan dukungan kepada sasaran penerima manfaat melalui tiga cara utama: mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan bisnis; memfasilitasi akses ke pengembangan keterampilan dan pekerjaan; dan menjamin pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif gender yang bebas dari diskriminasi.

Di Indonesia, empat badan PBB: International Labour Organization (ILO), UN Development Programme (UNDP), Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dan UN Refugee Agency (UNHCR) akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memastikan kelompok-kelompok rentan ini tidak tertinggal dan dirugikan dalam lingkungan masyarakat dan pasar tenaga kerja. Ketika kondisi pasar tenaga kerja memburuk, ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya juga semakin diperburuk. Menurut hasil survei angkatan kerja terbaru, 29 juta pekerja terkena imbas pandemi, di mana 24 juta pekerja mengalami pemotongan jam kerja dan pendapatan. Upah rata-rata menurun sebesar 5,2% antara tahun 2019 hingga 2020.

Sementara banyak dari mereka yang berpenghasilan tinggi dapat bekerja dari rumah dan pendapatan mereka relatif utuh, penderitaan akibat pandemi ini terutama dirasakan oleh pekerja berpenghasilan rendah karena hilangnya pendapatan utama mereka. Perwakilan PBB di Indonesia, Valerie Julliand mengatakan, “Beberapa kelompok rentan cenderung mengalami ketertinggalan selama krisis sosial ekonomi dan proses pemulihan. Merupakan tindakan yang sangat penting agar badan-badan PBB bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil dan mengambil tindakan katalis untuk memberi manfaat dan memberdayakan kelompok-kelompok ini secara langsung, sembari mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang ada saat ini di pasar tenaga kerja dan di masyarakat secara keseluruhan”.

Paket pendanaan MPTF COVID-19 pertama kali dialokasikan ke Indonesia pada Juni 2020 (USD 2 juta) untuk mendukung kemajuan mekanisme perlindungan sosial dan ekonomi di negara ini.

Kontak:

ILO: Gita Lingga, Communication Officer (gita@ilo.org)

UN Information Centre: Andri Suryo, National Information Officer (andri.suryo@un.org)

Tentang United Nations COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund/COVID-19 MPTF

COVID-19 MPTF adalah bagian dari United Nations COVID-19 Response and Recovery Fund yang merupakan mekanisme pendanaan antar badan PBB yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk membantu mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mengatasi krisis kesehatan dan krisis pembangunan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dan mendukung mereka yang paling rentan dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan gangguan sosial. Hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan dan menawarkan solusi inovatif yang memetakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif untuk semua orang.

Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030. UN Country Team dipimpin oleh Kepala Perwakilan PBB (UN Resident Coordinator/ RC) perwakilan tertinggi PBB sistem pembangunan di tingkat negara. RC memimpin UN Country Team dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyetujui tanggapan strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam melaksanakan Agenda 2030. Resident Coordinator (Kepala Perwakilan PBB) adalah perwakilan yang ditunjuk dari – dan melapor kepada – Sekretaris - Jenderal PBB.

Tentang Badan Pelaksana PBB

ILO: *International Labour Organization (ILO) didirikan pada tahun 1919 untuk mempromosikan keadilan sosial. Satu-satunya badan tripartit PBB yang mempertemukan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari 187 negara anggota, untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan merancang program yang mempromosikan pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki.*

UNAIDS: *The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) memimpin dan menginspirasi dunia untuk mencapai visi bersama untuk mencapai tidak ada infeksi HIV baru, tidak ada diskriminasi, dan tidak ada kematian terkait AIDS. UNAIDS menyatukan upaya 11 organisasi PBB — UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO dan Bank Dunia — dan bekerja erat dengan mitra global dan nasional untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. UNAIDS Indonesia telah menjadi mitra strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani respon nasional terhadap HIV dan populasi kunci.*

UNDP: *UN Development Programme (UNDP) adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkemuka yang berjuang mengakhiri ketidakadilan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Bekerja dengan jaringan pakar dan mitra yang luas di 170 negara, kami membantu negara-negara membangun solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan bumi. Pelajari lebih lanjut di www.undp.org atau follow kami di @UNDP*

UNHCR: Sejak 1950, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mendukung Pemerintah dalam memberikan perlindungan internasional dan menemukan solusi bagi pengungsi dan orang lain yang menjadi perhatian. Dalam mempromosikan solusi dan ketahanan pengungsi, UNHCR bekerja sama dengan Pemerintah, dalam merancang program pemberdayaan pengungsi yang memungkinkan pengungsi untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang aman, berkelanjutan dan bermartabat; menghindari ketergantungan bantuan dan mekanisme koping negatif; berkontribusi pada komunitas tuan rumah mereka; dan mempersiapkan pengungsi untuk masa depan mereka.